

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA
MODAL DI INDONESIA TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI



ACC UJIAW
4/25
JANUARI

Oleh :

Nama : Ahmad Nor Firdaus Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 19313009

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022/2023

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA
ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA
MODAL DI INDONESIA TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1 Program Studi Ekonomi Pembangunan, pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ahmad Nor Firdaus Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 19313009

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022/2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti yang dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, ... 2023

Penulis,



Ahmad Nor Firdaus Ramadhani

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

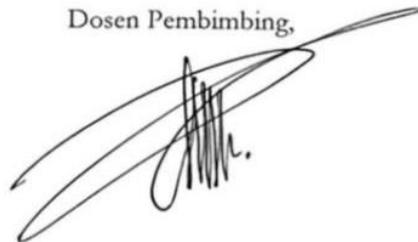
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL DI INDONESIA TAHUN 2016-2021

Nama : Ahmad Nor Firdaus Ramadhani
Nomor Mahasiswa : 19313009
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, ... 2023

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Jannahar Saddam Ash Shidiqie S.E.I., M.E.K.

PENGESAHAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANAK

Disusun oleh : AHMAD NOR FIRDAUS RAMADHANI

Nomor Mahasiswa : 19313009

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 13 Juni 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Jannahar Saddam Ash Shidiqie, SEI.,MEK.



Penguji : Moh.Bekti Hendrie Anto, SE., M.Sc.

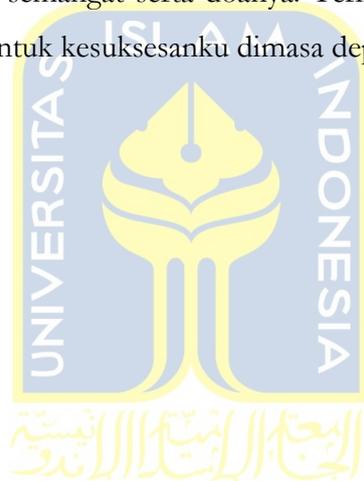


Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
* YOGYAKARTA *
John Arijin, S.E., M.Si., Ph.D.



PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur di panjatkan kepada Allah SWT. Lantunan doa beriringan selalu terpanjatkan kepada- Mu hingga terselesaikannya skripsi ini. Kupersembahkan tugas akhir ini untuk seluruh keluarga besar penulis, teruntuk orang tuaku serta adik – adik meskipun tidak akan mampu membalas segala yang telah kalian lakukan kepadaku, yang tiada hentinya selam ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani kehidupan sehingga sampai pada saatnya tiba, saya pun akan segera pulang kepada mereka dengan membawa sebuah gelar SARJANA EKONOMI. Penulis juga memberikan persembahan kepada teman – teman seperjuangan yang telah banyak membantu memberikan semangat serta doanya. Terimakasih untuk doa – doa yang selalu kalian panjatkan untuk kesuksesanku dimasa depan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia Tahun 2016-2021”**. Yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Ekonomi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal di Indonesia.

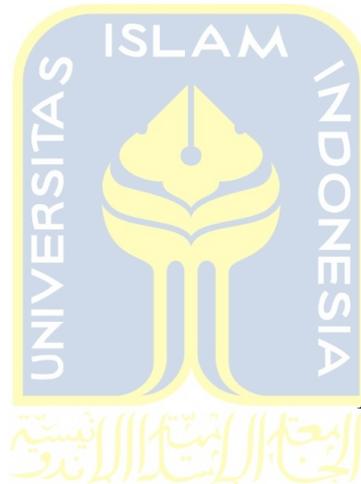
Pada penelitian skripsi ini dapat selesai karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan dengan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Johan Arifin, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Abdul Hakim S.E, M.Ec. selaku Kepala Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Jannahar Saddam Ash Shidiqie S.E.I., M.E.K. selaku dosen pembimbing dalam skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Moh. Bektu Hendrie Anto, SE., M.SC. selaku dosen penguji dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan revisi kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Staf karyawan Universitas Islam Indonesia yang memberikan ilmu dan pengalamannya kepada kami.
6. Kedua Orang Tua, Kakek dan Nenek, serta Adik-adik yang selalu memberikan doa dan perhatian dalam proses pembelajaran ini.
7. Teman-teman saya yaitu anak-anak “CLEVER TEAM”, teman-teman Kontrakan “THANKS A GOOD FRIENDS”, teman-teman Asrama

Kalimantan Selatan “PANGERAN HIDAYATULLAH” dan “the Special One” yang selalu menghargai, menyemangati, menemani, dan menjadi partner dalam segala hal yang terjadi selama proses perkuliahan.

8. Serta kepada semua yang sudah berkontribusi namun secara tidak sengaja tidak dapat penulis sebutkan, penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat menerima apabila ada saran dan kritikan yang diberikan oleh pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai kalangan terutama mahasiswa, dosen, dan pemerintah dalam melihat Ekonomi Makro di Indonesia yang jarang diperhatikan.



Yogyakarta, 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. N. F. R.', enclosed within a large, loopy oval shape.

Ahmad Nor Firdaus Ramadhani

DAFTAR ISI

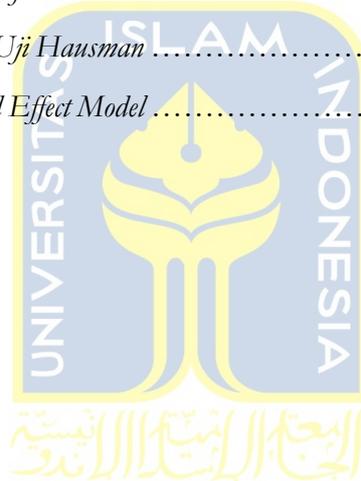
SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN UJIAN	v
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
2.1. Kajian Pustaka	7
2.1.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Teori	16
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	16
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah	17
2.2.3. Dana Alokasi Umum	17
2.2.4. Dana Alokasi Khusus	18
2.2.5. Belanja Modal	18

2.3.	Hipotesis Penelitian	18
2.3.1.	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal	19
2.3.2.	Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	19
2.3.3.	Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	20
2.3.4.	Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	21
2.4.	Kerangka penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN		23
3.1.	Jenis Penelitian	23
3.2.	Jenis Dan Sumber Data	23
3.3.	Metode Pengumpulan Data	23
3.4.	Definisi Operasional variabel	23
3.4.1.	Pertumbuhan Ekonomi	23
3.4.2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
3.4.3.	Dana Alokasi Umum (DAU)	24
3.4.4.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	25
3.4.5.	Belanja Modal	25
3.5.	Metode Analisis	26
3.6.	Estimasi Regresi Data Panel	27
3.6.1.	<i>Common Effect Model</i> (CEM)	27
3.6.2.	<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	27
3.6.3.	<i>Random Effect Model</i> (REM)	27
3.7.	Pemilihan Model yang Tepat	28
3.7.1.	<i>Chow Test</i> (Uji Chow)	28
3.7.2.	<i>Hausman Test</i> (Uji Hausman)	28
3.8.	Pengujian Hipotesis	29
3.8.1.	Koefisien Determinasi (R^2)	29
3.8.2.	Uji Simultan (Uji F)	29
3.8.3.	Uji Parsial (Uji t)	30

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Deskripsi Data Penelitian	31
4.2. Hasil dan Analisis	32
4.2.1. <i>Common Effect Model</i> (CEM)	32
4.2.2. <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	33
4.2.3. <i>Random Effect Model</i> (REM)	33
4.3. Hasil Pengujian Regresi Model Data Panel	34
4.3.1. Uji Chow	34
4.3.2. Uji Hausman	34
4.4. Hasil Pengujian Statistik	35
4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)	36
4.4.2. Koefisien Regresi Simultan (Uji F)	36
4.4.3. Koefisien Regresi Parsial (Uji t)	36
4.5. Interpretasi dan Pembahasan	37
4.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal	37
4.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal	38
4.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal	38
4.5.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal	39
 BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	 41
5.1. Simpulan	41
5.2. Implikasi	41
 DAFTAR PUSTAKA	 43
 LAMPIRAN	 49

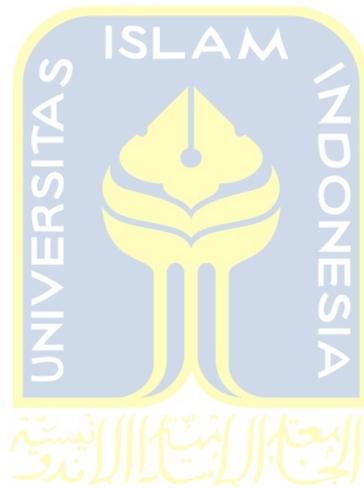
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1. Pendapatan Asli Daerah	24
Tabel 3.2. Belanja Modal	26
Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif	31
Tabel 4.2. Hasil Uji <i>Common Effect Model</i>	32
Tabel 4.3. Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	33
Tabel 4.4. Hasil Uji <i>Random Effect Model</i>	33
Tabel 4.5. Hasil Regresi Uji <i>Chow</i>	34
Tabel 4.6. Hasil Regresi Uji <i>Hausman</i>	35
Tabel 4.7. Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Data penelitian	49
Lampiran II. Analisis Deskriptif	54
Lampiran III. Hasil Uji Chow	54
Lampiran IV. Hasil Uji Hausman	55
Lampiran V. Hasil Uji <i>Fixed Effect Model</i>	55



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi Belanja Modal di Indonesia dari tahun 2016-2021. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Belanja Modal sebagai variabel dependen. Kemudian variabel independennya adalah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan penelitian ini menggunakan metode data panel, yaitu gabungan dari *time series*, berupa runtutan waktu dari tahun 2016-2021 dan data *cross section* yaitu berupa 34 provinsi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan bantuan dari program *software eviews 10*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal, Variabel PAD memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal dan DAK memiliki pengaruh positif terhadap variabel Belanja Modal. Sedangkan variabel DAU tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD (Pendapatan Asli Daerah), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan Belanja Modal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan. Dampaknya tidak hanya terasa di sektor swasta seperti pasar modal, tetapi juga di sektor publik, termasuk pemerintah daerah. Dampak yang terjadi sangat signifikan, dengan adanya peningkatan pengangguran dan kemiskinan sebagai dampak negatif utama. Namun, ada juga dampak positif, seperti peningkatan nilai ekspor beberapa komoditas, yang memberikan peningkatan pendapatan bagi produsen komoditas tersebut. Krisis ekonomi juga mempengaruhi sektor anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang merupakan sumber penerimaan yang fluktuatif. Hal ini berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), karena alokasi dana dari APBN ke APBD menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk secara konkret dan sistematis mengatur APBD agar mencerminkan kondisi riil masyarakat di setiap daerah. Kebijakan ini tercermin dalam komposisi tatanan unsur APBD (Ginting, 2012).

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk struktur belanja anggaran dalam APBD untuk meningkatkan aset tetap. Penggunaan anggaran belanja ini didasarkan pada kebutuhan daerah dalam infrastruktur, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk kenyamanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam alokasi belanja untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan otoritas daerah seharusnya mengubah cara belanja mereka. Saat ini, anggaran daerah banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Perubahan dalam alokasi belanja ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas yang diperlukan. Pemerintah biasanya mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi. Pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pada penelitian oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007), mereka menemukan bahwa ketika infrastruktur industri dikembangkan di suatu daerah, tarif pajak daerah akan meningkat. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya mengalokasikan anggaran belanja untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan. Menurut Darwanto dan Yulia Yustikasari, pemerintah harus lebih fokus pada layanan publik seiring dengan peningkatan pendapatan. Kedua pendapat tersebut menunjukkan pentingnya keputusan dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan berbagai kelompok (Pangestu dkk., 2019).

Menurut UU No. 32/2004 mengatakan bahwa sebelum Pemerintah Daerah mulai memiliki kewenangan, Pemerintah Pusat akan mentransfer uang dari beberapa dana pemerintah lainnya. Uang ini akan digunakan untuk membantu Daerah menyeimbangkan anggarannya. Di samping usaha rasio tersebut, Pemerintah Daerah menyimpan sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan. Daerah yang perubahan ekonominya positif memegang kesempatan mendapatkan peningkatan PAD. Dari perspektif ini seharusnya Pemerintah Daerah lebih berkonsentrasi dalam pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal dalam menjelang pertumbuhan ekonomi daripada sekedar perundangan terkait dengan pajak maupun retribusi. Alokasi sumber daya bagian dalam menjalani refraksi ketika politikus berperilaku korupsi. Perilaku korupsi ini tergantung terkait kesempatan untuk mendapatkan

keuntungan pribadi terkait dengan rancangan-rancangan yang akan dibiayai dengan anggaran belanja, yakni pemberian akan lebih berlebihan kepada rancangan-rancangan yang mudah di korupsi dan memberikan keuntungan politis bagi politikus. Keterbatasan sumber daya seperti pangkal permasalahan yang utama pada pengalokasian berupa anggaran sektor publik dalam mengatasi pendekatan ekonomi melalui berbagai teknik dan pemahaman yang di kenal dalam publik *expenditure management* (Jolianis, 2014).

Tingkat kemajuan ekonomi adalah salah satu sasaran penting kekuasaan tertinggi negara maupun pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk menerapkan restorasi ekonomi dengan menyelenggarakan kebijakan yang tepat dan menciptakan kemitraan yang erat dengan sektor sipil untuk menciptakan lapangan kerja baru yang akan mendorong perputaran program ekonomi di negara tersebut. (Berlianantiya, 2017) Pembangunan ekonomi ditandai pakai meningkatnya daya kreasi dan nafkah perkapita warga sehingga kelahirannya pembetulan kesejahteraan. Kenyataan yang kelahirannya bagian dalam Pemerintah Daerah zaman ini adalah penambahan kemajuan ekonomi tidak selalu diikuti pakai penambahan pengeluaran substansi, pasal tertera bisa dilihat pecah kecilnya perkiraan pengeluaran substansi yang dianggarkan pakai kuantitas pengeluaran pengeluaran negara.

Anggaran belanja modal adalah cara pemerintah daerah membelanjakan uang untuk hal-hal seperti fasilitas dan infrastruktur publik. Tetapi karena pembuat undang-undang yang terlibat dalam penyusunan anggaran memiliki kepentingannya sendiri (kebanyakan politik), anggaran seringkali tidak menggunakan semua uang yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Penelitian ini menggunakan kerangka karya Priyo Hari Adi dan David Harianto (2007) dan menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pemerintah daerah di seluruh provinsi Indonesia yang bertugas

dalam rangka penetapan alokasi dana untuk anggaran belanja modal dalam APBD yang didasarkan pada kebutuhan daerah akan peralatan dan infrastruktur yang baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas untuk instansi pemerintah dan badan pelayanan publik.

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membantu mendanai berbagai hal di berbagai bagian negara. Mereka terutama digunakan untuk membantu membayar desentralisasi, yang merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membuat layanan pemerintah lebih tersedia dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan juga untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Salindeho, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap alokasi anggaran belanja modal di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat menjadi wawasan dan acuan dalam kebijakan ekonomi yang tepat untuk diterapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh PAD terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah ada pengaruh DAU terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apakah ada pengaruh DAK terhadap alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

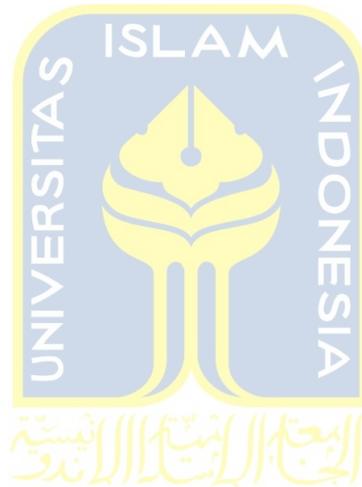
Selaras dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia.
2. Menganalisis adanya pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia.
3. Menganalisis adanya dana alokasi umum (DAU) terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia.
4. Menganalisis adanya dana alokasi khusus (DAK) terhadap anggaran belanja modal pemerintah daerah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Di bidang akademik, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pertumbuhan ekonomi hingga realisasi penuh anggaran Belanja Modal dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini baik pemerintah daerah maupun provinsi dapat diperhitungkan dalam keputusan kebijakan terkait penyusunan APBD.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Berdasarkan bab ini, telah dipelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait dengan topik penelitian ini. Hal ini mencakup perbandingan dan perbedaan metode analisis, variabel, skala data, uji statistik, dan aspek lain yang terkait dengan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Penelitian sebelumnya ini digunakan sebagai referensi dan dukungan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian terdahulu yang mendasari ide pemikiran untuk penelitian baik dari permasalahan, landasan teori, model penelitian, analisis data, dan hasil dari penelitian yang telah dicapai. Pada penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk mempelajari pertumbuhan ekonomi sebagai proses peningkatan output per kapita dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan salah satu indikator penting pembangunan suatu negara, dan kajian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Kajian tentang Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Kajian tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah. Mereka digunakan untuk membiayai kegiatan

khusus di bidang tertentu, tergantung pada prioritas nasional. Ini dapat mencakup hal-hal seperti berinvestasi dalam fasilitas dan infrastruktur layanan masyarakat dasar yang perlu ditingkatkan, atau membantu mempercepat pembangunan daerah. Kajian tentang belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat mencakup apa saja yang membutuhkan uang untuk dibeli, seperti tanah, bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Tari Natalia Nataisya Lontoh (2016) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode yang disebut analisis regresi linier berganda untuk mengetahui faktor apa yang mungkin bertanggung jawab atas hasil tertentu. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengujian, secara parsial pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan dan untuk dana alokasi umum justru memberikan pengaruh yang signifikan positif terhadap pengalokasian belanja modal (Dana dkk., 2016).

Rio Febrian Sirait (2022) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yang disebut analisis regresi linier berganda untuk mengetahui faktor apa yang mungkin bertanggung jawab atas hasil tertentu. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengujian menunjukkan bahwa ekonomi pertumbuhan tidak memiliki dampak pada belanja modal. Pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak terhadap modal pengeluaran. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Spesial dana alokasi berpengaruh terhadap belanja modal. Kemudian pertumbuhan ekonomi, regional pendapatan asli, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dan secara bersamaan mempengaruhi modal pengeluaran (Imron & Hamidah, 2022).

Nugroho Suratno Putro (2010) meneliti bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum yang mempengaruhi berapa banyak uang yang dibelanjakan bisnis untuk pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode data kuantitatif yaitu Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Aceh tahun 2015 – 2017. Penelitian ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah tidak memiliki dampak terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil tidak memiliki dampak terhadap belanja modal (Suryani Putri, 2016).

Yanggi Ningsasra (2016) meneliti bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang mempengaruhi berapa banyak uang yang dibelanjakan pemerintah untuk pengalokasian anggaran belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausal dengan laporan realisasi APBD di Sumatera bagian tengah untuk tahun anggaran 2009 – 2013. Penelitian ini menghasilkan hasil yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana tingkat signifikan masing-masing adalah 0,0069 dan 0,000 (Pada dkk., 2009).

Ufi Rumefi (2018) meneliti bagaimana pertumbuhan ekonomi, pendapatan pemerintah daerah, dan dana alokasi umum yang mempengaruhi berapa banyak uang yang dihabiskan untuk belanja modal. Penelitian ini menggunakan metode analisis persamaan linier berganda. Penelitian ini menghasilkan nilai signifikan $0,000 < (a) 0,05$ dari semua variabel bebas menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal karena nilai signifikansi yaitu $0,153 > (a) 0,05$. Sedangkan untuk Uji F/simultan diperoleh nilai signifikansi $0,000 < (a) 0,05$ jadi semua variabel bebas berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal (Rumefi, 2018).

Nia Sukmawati (2021) meneliti bagaimana pengaruh berbagai jenis pendanaan pemerintah terhadap anggaran belanja modal pemerintah Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif asosiatif yaitu analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menghasilkan hasil bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal ditunjukkan dengan angka signifikansi korelasi sebesar 0,553; koefisien korelasi 0,359. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal ditunjukkan dengan angka signifikansi korelasi sebesar 0,188; koefisien korelasi 0,700. Korelasi antara dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak terlalu kuat. Korelasi antara belanja modal dan dana ini jauh lebih kuat sebesar 0,546; koefisien determinasi 0,298 (Sukmawati dkk., 2021).

Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan/referensi dalam penelitian ini seperti pada Tabel 2.1 :



Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

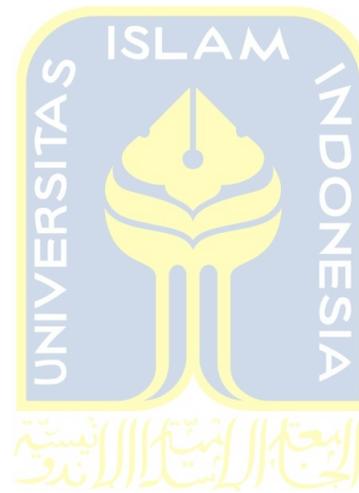
Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
Tari Natalia Nataisya Lontoh (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Kota Tomohon	<p>Metode penelitian ini adalah data <i>Time Series</i> (runtun waktu) yang merupakan data sekunder</p> <p>Variabel berupa pertumbuhan menghitung pengaruh dari Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kota Tomohon</p> <p>Skala data yaitu skala data nominal</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu analisis bivariat atau <i>Chi square</i>.</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data panel</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i> dan uji <i>Hausman</i></p>
Rio Febrian Sirait (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi,</p>

	<p>Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara</p>	<p>Variabel berupa independen yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Berupa dependen yaitu belanja modal</p> <p>Skala data yaitu skala data nominal</p> <p>Uji statistic yang digunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji determinasi.</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data panel</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i> dan uji <i>Hausman</i></p>
<p>Nugroho Suratno Putro (2010)</p>	<p>Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif</p> <p>Variabel berupa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dan belanja modal</p> <p>Skala data yaitu skala data ordinal</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data panel</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i></p>

			dan uji <i>Hausman</i>
Yanggi Ningsasra (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	<p>Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan metode asosiatif kausal</p> <p>Variabel berupa pengalokasian anggaran belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU)</p> <p>Skala data yaitu skala data nominal</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i> atau <i>Likelihood test</i> dan <i>Hausman test</i></p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data panel</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i> dan uji <i>Hausman</i></p>
Ufi Rumefi (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap	<p>Metode yang digunakan dengan metode pendekatan inferensial kuantitatif</p> <p>Variabel berupa pertumbuhan ekonomi, pengalokasian belanja modal, anggaran</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana</p>

	Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	<p>belanja modal</p> <p>Skala data yaitu skala data nominal</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji analisis regresi ganda</p>	<p>Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data panel</p> <p>Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i> dan uji <i>Hausman</i></p>
Nia Sukmawati (2021)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi.	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif dan Metode Asosiatif</p> <p>Variabel berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data nominal</p> <p>Uji statistik yang digunakan yaitu uji <i>Chi</i></p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif</p> <p>Variabel berupa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal</p> <p>Skala data yaitu skala data panel</p>

		<i>square</i>	Uji statistic yang digunakan yaitu uji <i>Chow test</i> dan uji <i>Hausman</i>
--	--	---------------	--



2.2. Landasan Teori

Anggaran daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan mencerminkan pendekatan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat dengan memperhitungkan potensi dan sumber daya keuangan setempat. Anggaran merupakan suatu pernyataan mengenai proyeksi kinerja organisasi dalam jangka waktu tertentu, terkait dengan tindakan-tindakan yang bersifat keuangan.

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses jangka panjang peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh setiap orang di suatu wilayah tertentu. Pada penekanan ini ialah proses karena masuknya elemen dinamis. Para ahli teori ekonomi pembangunan saat ini berusaha menyempurnakan makna, hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi. Para ahli teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya oleh peningkatan PDB dan Produk Domestik Bruto, tetapi juga oleh bobot tidak berwujud seperti kebahagiaan, kepuasan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang dirasakan oleh masyarakat secara umum (Rizki Ardiyani, 2017).

Menurut ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill) dan ekonomi neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), ada empat faktor utama yang memberikan pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) tingkat persediaan barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian tumbuh atau berkembang ketika tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari periode sebelumnya (Donarich Natanael, 2016).

Hubungan pertumbuhan ekonomi berdasarkan penelitian terdahulu memiliki hubungan yang sangat erat karena dengan semakin pesatnya ekonomi akan meningkatkan PAD dan DAU yang akan menjadi pemasok besar terhadap belanja modal.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah sistem pengelolaan kekayaan daerah yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mencari pendanaan untuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari prinsip desentralisasi, dan hasil pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Hubungan keuangan pusat daerah melibatkan kontrol tingkat tinggi oleh pemerintah pusat atas bagaimana daerah dikembangkan. Hal ini terlihat jelas dari kecilnya proporsi PAD (pendapat) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan dibandingkan dengan besarnya subsidi yang diberikan oleh pusat. Ukuran desentralisasi fiskal adalah rasio PAD terhadap pendapatan daerah bruto. PAD terdiri dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan jasa, pendapatan bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendapatan lainnya (Aprilianda, 2016).

Tingkat pendapatan asli daerah yang semakin meningkat karena lancarnya aktivitas ekonomi akan memberikan dampak terhadap anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk belanja modal.

2.2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU yang diberikan kepada daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan kinerja keuangan antara daerah, dan besarnya setidaknya 25% dari anggaran rutin APBN. Dana tersebut didistribusikan dengan alokasi 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Cara merumuskan perhitungan alokasi, faktor kebutuhan dan potensi masing-masing daerah diperhitungkan, dengan tujuan untuk mengoreksi formula alokasi agar terjadi pemerataan kekuatan keuangan antar daerah. DAU merupakan representasi dari perbedaan antara kebutuhan dan potensi keuangan suatu daerah. Undang-undang yang berlaku juga menegaskan cara perhitungan kesenjangan fiskal dan penambahan variabel DAU. Daerah yang memiliki potensi anggaran tinggi tetapi kebutuhan anggaran rendah akan menerima alokasi DAU yang relatif kecil, sementara daerah

sebaliknya akan menerima alokasi yang lebih besar. Prinsip ini secara tidak langsung menegaskan peran DAU sebagai faktor dalam pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Ndraha & Uang, 2018). Sehingga dana alokasi umum akan memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya belanja modal pemerintah pada setiap tahunnya.

2.2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan maksud membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan tanggung jawab daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan melalui APBN oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional, terutama untuk memperbaiki infrastruktur, fasilitas umum, dan peningkatan pengeluaran modal. Salah satu tujuan pemberian bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui DAK adalah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana fisik, terutama infrastruktur (Sukmawati dkk., 2021). Pengalokasian anggaran dana alokasi khusus ini bergantung pada anggaran belanja modal yang tersedia.

2.2.5. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk investasi permanen, aset tetap, dan aset berwujud lainnya untuk mendukung kegiatan pemerintah dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pengelompokan belanja modal meliputi pengeluaran untuk memperoleh investasi permanen dan pengeluaran untuk membeli aset tetap (Monalisa, 2019).

2.3. Hipotesis Penelitian

Pada landasan teori yang ditemukan di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

2.3.1. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produksi per individu yang diukur dengan Produk Domestik Bruto Regional. Tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk mencapai peningkatan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Salah satu syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah mempertahankan keseimbangan antara tingkat investasi pembangunan dengan pertumbuhan penduduk. Diharapkan bahwa peningkatan dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Berdasarkan landasan teori dan argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga tingkat pertumbuhan ekonominya juga berbeda. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, akan menghasilkan peningkatan investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam merencanakan anggaran belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.3.2. Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Penelitian dari (Darwanto & Yustikasari, 2014) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya PAD merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Hal ini sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Dalam penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan

daerah serta mempertimbangkan jumlah PAD yang diterima. Oleh karena itu, apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, mereka perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebanyak mungkin.

Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai di suatu daerah akan berdampak pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal oleh pemerintah. Peningkatan belanja modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan pada akhirnya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang tercermin dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.3.3. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Menurut (Prakosa, 2004), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pembelanjaan. Hal ini terkait dengan pengaturan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Transfer ini memiliki dampak yang signifikan sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk meningkatkan pelayanan publik. DAU dapat digolongkan sebagai transfer tak bersyarat atau *block grant*, yaitu jenis transfer antara tingkat pemerintahan yang

tidak terkait dengan program pengeluaran khusus. Penggunaan DAU ini bertujuan untuk meratakan kemampuan keuangan daerah guna menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin besar pula aktivitas belanja modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah pusat mengharapkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah akan lebih optimal dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga tidak hanya bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU). Melalui transfer DAU dari pemerintah pusat, daerah dapat lebih fokus menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimilikinya untuk membiayai belanja modal yang mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah, terutama belanja modal, sangat dipengaruhi oleh penerimaan DAU. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah DAU, maka alokasi belanja modal juga akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang tinggi akan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Diduga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.3.4. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

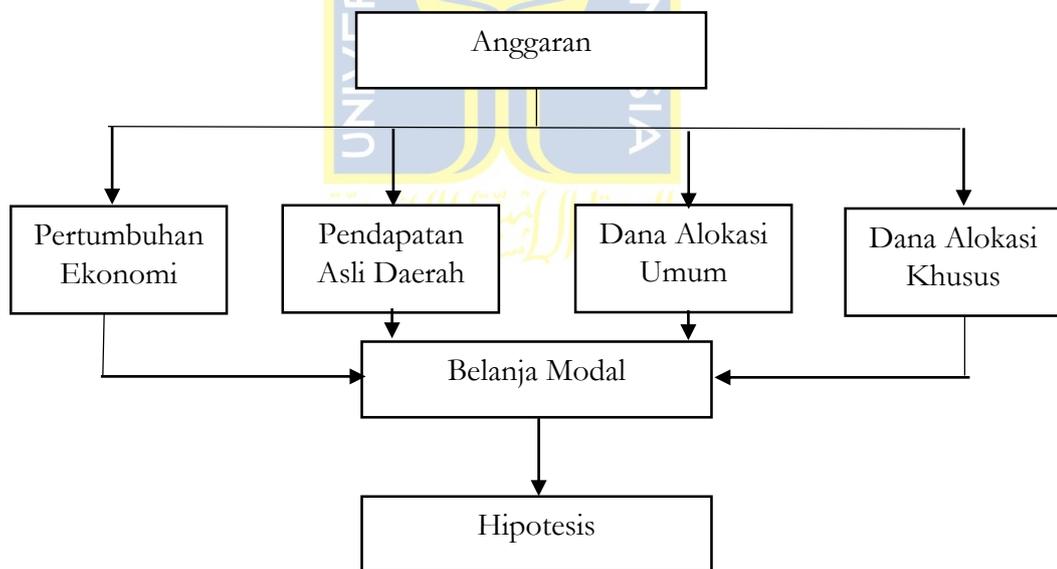
Dana alokasi khusus merujuk pada dana yang diperoleh dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan dana alokasi khusus difokuskan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur fisik dengan usia ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik pendukung. Dengan pengalokasian dana alokasi khusus, diharapkan dapat mempengaruhi alokasi

anggaran belanja modal, karena dana tersebut cenderung meningkatkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan temuan penelitian di atas, semakin besar jumlah dana alokasi khusus, maka semakin besar pula aktivitas belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Diduga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal

2.4. Kerangka Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian yang dipaparkan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dikarenakan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal di Indonesia tahun 2016-2021.

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dianalisis dari penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan data antara data *cross-sectional* atau data pada suatu titik waktu tertentu yang disandingkan dengan data *time-series* atau data runtun waktu. Pada metode kuantitatif, data panel juga disebut sebagai data pooling. Dari laporan realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap anggaran Belanja Modal.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data didapat dari Simreg Bappenas, DJPK Kemenkeu APBD, DJPK Kemenkeu TKDD dan DJPK Kemenkeu. Data yang digunakan yaitu tahun 2016-2021 per provinsi di Indonesia.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel serta definisi operasional sebagai berikut:

3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 1967), Pertumbuhan ekonomi secara empiris menunjukkan pengaruh alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa ahli memaparkan hasil penelitiannya bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara

berkembang, namun sebagian besar masih bersifat lokal, sehingga dapat dibuat rekomendasi untuk masing-masing daerah otonom sesuai jenis karakternya dan potensi daerah.

3.4.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah yang sah. Menurut (Syah, 2004), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada di daerahnya sendiri, yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber pendapatan asli daerah yang digali di daerah untuk dijadikan sebagai modal saham pemerintah daerah untuk mendanai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan pendapatan daerah wajib lainnya.

Rumus Variabel Pendapatan Asli daerah dapat diukur dengan:

Tabel 3.1. Pendapatan Asli Daerah

$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$

3.4.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Transaksi transfer yang umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal dan mencapai kesetaraan keuangan antara daerah. Menurut Perimbangan Keuangan antara Negara dan Pemerintah Daerah (Syah, 2004), perimbangan keuangan ini berhubungan dengan sistem keuangan nasional yang berlaku dalam negara kesatuan. Sistem tersebut mencakup transfer dana antara pemerintah pusat dan daerah. Prinsip yang dipegang adalah keadilan, demokrasi, kesetaraan antardaerah, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini memperhatikan kemungkinan, kondisi, dan kebutuhan masing-masing daerah sesuai dengan tanggung jawab dan pembagian kewenangan, termasuk pengelolaan dan pengendalian keuangan. Dana yang

diterima pemerintah daerah melalui perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.

Menurut (Syah, 2004), berdasarkan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah daerah ditetapkan minimal sebesar 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembagian DAU daerah didasarkan pada defisit dana negara dan alokasi dasar. Perhitungan defisit keuangan didasarkan pada kebutuhan keuangan daerah setelah dikurangi dengan kemampuan keuangan daerah, sementara alokasi dasar ditentukan berdasarkan jumlah pegawai pemerintah daerah. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditentukan berdasarkan pembagian kewenangan antara kedua entitas tersebut. Alokasi umum yang diberikan setiap bulan sebesar $\frac{1}{2}$ dari alokasi umum yang dimiliki oleh daerah terkait.

3.4.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sumber daya dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan tertentu yang konsisten dengan prioritas daerah dan nasional. Dana alokasi khusus tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah menjelaskan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK adalah Penerimaan APBN menghasilkan dana yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan tertentu yang konsisten dengan prioritas daerah dan nasional. Dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dan dapat membangun perekonomian nasional (Syah, 2004).

3.4.5. Belanja Modal

Merupakan biaya langsung yang digunakan untuk membiayai aktivitas investasi. Menurut (BPK, 2010), investasi nilai tetap adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang akan memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Investasi termasuk investasi dalam akuisisi tanah, bangunan dan struktur, peralatan dan aset tidak berwujud.

Rumus variabel belanja modal dapat diukur dengan:

Tabel 3.2. Belanja Modal

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +
Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan,
Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap
Lainnya

3.5. Metode Analisis

Pada penelitian ini, dilakukan analisis regresi data panel untuk menganalisis data. Program *eviews 10* digunakan sebagai alat bantu dalam analisis data tersebut. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal (Y), sementara variabel independennya terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi (X_1), PAD (X_2), DAU (X_3), dan DAK (X_4). Untuk memahami pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen, sebuah model dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{LOG}(Y_t) = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 \text{LOG}(X_{2t}) + \beta_3 \text{LOG}(X_{3t}) + \beta_4 \text{LOG}(X_{4t}) + e_{it}$$

Keterangan:

$\text{LOG}(Y_t)$ = Logaritma Belanja Modal

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien variabel X_1

β_2 = Koefisien variabel X_2

β_3 = Koefisien variabel X_3

β_4 = Koefisien variabel X_4

(X_1) = Pertumbuhan Ekonomi

$\text{LOG}(X_2)$ = Logaritma PAD

$\text{LOG}(X_3)$ = Logaritma DAU

$\text{LOG}(X_4)$ = Logaritma DAK

i = 34 Provinsi di Indonesia

t = Tahun 2016 - 2021

e = Komponen error

3.6. Estimasi Regresi Data Panel

Penelitian yang dilakukan oleh (Widarjono, 2007), dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengestimasi model regresi menggunakan data panel. Metode-metode tersebut meliputi *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).

3.6.1. *Common Effect Model* (CEM)

Estimasi data panel pada *Common Effect* digunakan sebagai pendekatan yang paling simpel. Pada pendekatan ini, data *time series* dan data *cross section* digabungkan tanpa mempertimbangkan perbedaan waktu. Selain itu, metode CEM tidak memperhatikan perbedaan individu dan waktu, dengan asumsi bahwa mereka memiliki perilaku yang serupa.

3.6.2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode FEM merupakan suatu pendekatan dalam pengolahan data yang melibatkan pengidentifikasian perbedaan antara objek-objek dengan asumsi bahwa *Slope*-nya tetap konstan. Pendekatan ini melibatkan penggunaan variabel tambahan yang disebut variabel dummy, yang berfungsi untuk melacak perbedaan data dalam periode waktu tertentu. Metode FEM berguna dalam menganalisis perilaku setiap data secara terpisah. Namun, kelemahan dari metode ini adalah berkurangnya derajat kebebasan, yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan efektivitas parameter yang diperoleh.

3.6.3. *Random Effect Model* (REM)

Akibat dari kelemahan metode FEM, muncul metode REM yang membantu mengatasi masalah tersebut dengan memasukkan variabel gangguan, yang juga dikenal sebagai *error terms*. Variabel gangguan ini terdapat kemungkinan adanya hubungan antara objek-objek guna mengatasi heteroskedastisitas.

3.7. Pemilihan Model yang Tepat

Pemilihan model yang tepat untuk menentukan model yang paling sesuai dalam penelitian ini, pertimbangan utama adalah memilih model yang sesuai berdasarkan analisis statistik. Untuk mengetahui model yang paling tepat, diperlukan serangkaian pengujian sebagai berikut:

3.7.1. *Chow Test* (Uji Chow)

Uji Chow dilakukan untuk memperoleh pemahaman mengenai model mana yang lebih cocok digunakan, baik itu *common effect* atau *fixed effect*. Sebelum menjalankan pengujian, hipotesis yang akan diuji perlu ditetapkan seperti berikut ini:

H0: *Common Effect* model yang tepat digunakan

H1: *Fixed Effect* yang tepat digunakan

Model uji Chow, membandingkan statistik F dan tabel F, hal ini dilihat sebagai dasar penolakan dalam hipotesis ini. Jika F-statistik lebih besar dari F-tabel ($F\text{-statistik} > F\text{-table}$), di mana tidak menolak H0 berarti model *common effect* paling cocok untuk digunakan. Sedangkan jika F statistik kurang dari F-tabel ($F\text{-statistik} < F\text{-table}$) maka menolak H0, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah model *fixed effect*.

3.7.2. *Hausman test* (Uji Hausman)

Setelah menyelesaikan uji Chow sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman untuk menentukan apakah model yang paling cocok adalah *fixed effect* atau *random effect*. Jika hasil uji Chow sebelumnya sudah menunjukkan bahwa model *common effect* adalah yang paling tepat, maka tidak diperlukan uji Hausman tambahan. Namun, jika hasil uji Chow menunjukkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat, maka perlu dilakukan uji Hausman ulang. Pemilihan model yang paling sesuai antara *fixed effect* dan *random effect*, uji Hausman perlu dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H0: Random Effect yang tepat digunakan

H1: Fixed Effect yang tepat digunakan

Apabila model *fixed effect* paling tepat digunakan adalah ketika menolak H_0 , dimana nilai statistik uji hausman lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kritisnya. Sedangkan model *random effect* paling tepat digunakan ketika gagal menolak H_0 , dimana nilai statistik hausman lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai kritisnya.

3.8. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis yang terdiri dari koefisien determinasi (R^2), uji regresi bersama – sama (Uji F), dan uji koefisien regresi parsial (Uji t).

3.8.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan uji Koefisien Determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji ini menghasilkan angka antara nol hingga satu. Jika angka tersebut semakin besar atau mendekati satu, maka variabel bebas dianggap lebih baik dalam menjelaskan variabel terikat. Namun, jika angka koefisien determinasi kecil atau mendekati nol, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variabel terikat.

3.8.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dalam pengujian statistik digunakan untuk menentukan apakah secara keseluruhan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah pernyataan hipotesis uji F yang diajukan:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

Ketika nilai prob. F-hitung $< 0,1$ ($\alpha = 10\%$) maka kita akan menolak H_0 dan menerima H_1 yang artinya seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara signifikan. Namun, apabila nilai probabilitas F-hitung kurang dari 0,1 maka gagal menolak H_0 dan menolak H_1 yang berarti seluruh variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.8.3. Uji Parsial (Uji t)

Uji t parsial digunakan untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas t-hitung kurang dari 0,1 maka menolak H_0 dan menerima H_1 yang artinya variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. sebaliknya, nilai probabilitas t-hitung kurang dari maka gagal menolak H_0 dan menolak H_1 , artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data panel yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross-section*, yang berarti data terdiri dari beberapa objek dengan rentang waktu tertentu. Data *time series* yang digunakan meliputi periode 2016 hingga 2021, sementara data *cross-section* terdiri dari 34 provinsi di Indonesia. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini mencakup variabel Y (Belanja Modal) sebagai variabel dependen, dan variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi), X2 (PAD), X3 (DAU), dan X4 (DAK) sebagai variabel independen. Proses analisis dalam penelitian ini menggunakan program *Software Eviews 10*.

Tabel 4.1. Analisis Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	1.314,98	3,98	4.536,66	1.565,68	239,84
Median	923,18	5,03	1.864,34	1.398,64	228,46
Maximum	14.118,61	20,60	45.707,40	3.998,43	814,90
Minimum	176,34	-15,74	277,69	80,00	2,75
Std. Dev	1.646,34	3,72	7.904,95	718,79	122,18
Observations	204	204	204	204	204

Sumber: Data BPS 34 Provinsi di Indonesia, data diolah

Hasil deskriptif terhadap Belanja Modal (Y) memiliki rata-rata sebesar Rp1.314,98 M dan standar deviasi sebesar Rp1.646,34 M. Belanja Modal tertinggi adalah sebesar Rp14.118,61 M yaitu Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 dan terendah mencapai nilai Rp176,34 jt yaitu Provinsi Gorontalo tahun 2021.

Hasil deskriptif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki rata-rata sebesar 3.98% dan standar deviasi sebesar 3.72%. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi adalah sebesar 20.60 % yaitu Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 dan terendah mencapai nilai -15.74% yaitu Provinsi Papua tahun 2019.

Hasil deskriptif terhadap PAD (X2) memiliki rata-rata sebesar Rp4.536,66 M dan standar deviasi sebesar Rp7.904,95 M. PAD tertinggi adalah sebesar

Rp45.707,40 M yaitu Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 dan terendah mencapai nilai Rp277,69 jt yaitu Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016.

Hasil deskriptif terhadap DAU (X3) memiliki rata-rata sebesar Rp1.565,68 M dan standar deviasi sebesar Rp718,79 jt. DAU tertinggi adalah sebesar Rp3.998,43 M yaitu Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dan terendah mencapai nilai Rp80,00 jt yaitu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016.

Hasil deskriptif terhadap DAK (X4) memiliki rata-rata sebesar Rp239,84 jt dan standar deviasi sebesar Rp122,18 jt. DAK tertinggi adalah sebesar Rp814,90 jt yaitu Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dan terendah mencapai nilai Rp2,75 jt yaitu Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

4.2. Hasil dan Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel yang terdiri dari *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* dipilih untuk mendapatkan jenis model terbaik. Pemilihan model terbaik yang akan digunakan dapat diuji dengan Uji Chow untuk pemilihan model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dan Uji Hausman. Ada dua model yang digunakan para ilmuwan yaitu: *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. *Fixed Effect Model* mengasumsikan bahwa perilaku setiap kelompok orang adalah sama, sedangkan *Random Effect Model* mengasumsikan bahwa perilaku setiap kelompok orang berbeda.

4.2.1. *Common Effect Model* (CEM)

Tabel 4.2. Hasil Uji *Common Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.427223	0.537105	6.380913	0.0000
X1	0.004816	0.009008	0.534553	0.5936
LOG(X2)	0.426684	0.031036	13.74796	0.0000
LOG(X3)	0.100927	0.093735	1.076735	0.2829
LOG(X4)	-0.105658	0.054282	-1.946451	0.0530
R-squared	0.560828	F-statistic		63.53136
Adjusted R-squared	0.552000	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.2. Menunjukkan hasil R^2 yang bersumber dari *Adjusted R-squared* sebesar 0.552000, yang berarti variabel terikat mampu menjelaskan variabel bebas sebanyak 55% dan sebanyak 45% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.2. Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 4.3. Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.039824	0.885946	5.688636	0.0000
X1	0.013592	0.003420	3.974556	0.0001
LOG(X2)	0.260393	0.122267	2.129713	0.0347
LOG(X3)	-0.080595	0.051877	-1.553585	0.1222
LOG(X4)	0.071572	0.037223	1.922791	0.0562
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.895130	F-statistic		38.29490
Adjusted R-squared	0.871755	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.3. Menunjukkan hasil R^2 yang bersumber dari *Adjusted R-squared* sebesar 0.871755, yang berarti variabel terikat mampu menjelaskan variabel bebas sebanyak 87% dan sebanyak 13% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.3. Random Effect Model (REM)

Tabel 4.4. Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.207988	0.702111	5.993336	0.0000
X1	0.006407	0.005939	1.078877	0.2819
LOG(X2)	0.414855	0.058591	7.080490	0.0000
LOG(X3)	-0.055463	0.088173	-0.629022	0.5301
LOG(X4)	-0.022843	0.052027	-0.439063	0.6611
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.398334	0.6692
Idiosyncratic random			0.280063	0.3308
Weighted Statistics				
R-squared	0.210659	F-statistic		13.27723
Adjusted R-squared	0.194792	Prob(F-statistic)		0.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.550646	Mean dependent var		6.872854
Sum squared resid	45.04093	Durbin-Watson stat		0.465074

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.4. Menunjukkan hasil R^2 yang bersumber dari *Adjusted R-squared* sebesar 0.194792, yang berarti variabel terikat mampu menjelaskan variabel bebas sebanyak 19% dan sebanyak 81% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3. Hasil Pengujian Regresi Model Data Panel

Regresi data panel mempunyai tiga model regresi, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk memilih model regresi yang paling tepat dilakukan Uji Chow dan Uji Hausman.

4.3.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melihat model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model}$$

Apabila nilai prob. F > 0,1 ($\alpha = 10\%$) maka kita akan menerima H_0 sehingga menggunakan model *Common Effect* atau apabila nilai prob. F < 0,1 ($\alpha = 10\%$) maka kita akan menerima H_1 sehingga menggunakan model *Fixed Effect*. Berikut ini adalah hasil dari regresi Uji Chow:

Tabel 4.5. Hasil Regresi Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.976721	(33,166)	0.0000
Cross-section Chi-square	248.501829	33	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.5. Menunjukkan nilai *Cross-section Chi-square* sebesar 248.501829 dengan prob 0.0000 yang mana lebih kecil dibandingkan alpha (α) = 10% sehingga model terbaik yang digunakan dalam uji hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

4.3.2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memutuskan model mana yang terbaik untuk kumpulan data tertentu antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Hipotesis Uji Hausman, yaitu:

H_0 = Random Effect Model

H_1 = Fixed Effect Model

Apabila nilai prob. Chi-square $> 0,1$ ($\alpha = 10\%$) maka kita akan menerima H_0 dengan menggunakan model *Random Effect*, tetapi apabila nilai prob. *Chi-square* $< 0,1$ ($\alpha = 10\%$) maka kita akan menerima H_1 dengan model *Fixed Effect*. Berikut merupakan hasil regresi dari Uji Hausman:

Tabel 4.6. Hasil Regresi Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.161954	4	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Tabel 4.6. Menunjukkan nilai *Chi-square* sebesar 27.161954 dengan prob 0.0000 yang mana lebih kecil dibandingkan alpha (α) = 10% sehingga model terbaik yang digunakan dalam uji hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

4.4. Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan dari uji chow dan uji hausman didapatkan model terbaik untuk penelitian ini adalah *fixed effect model*. *Fixed effect model* diketahui menjadi model yang terbaik untuk mengestimasi pengaruh variabel X1, X2, X3, dan X4, terhadap variabel Y.

Tabel 4.7. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.039824	0.885946	5.688636	0.0000
X1	0.013592	0.003420	3.974556	0.0001
LOG(X2)	0.260393	0.122267	2.129713	0.0347
LOG(X3)	-0.080595	0.051877	-1.553585	0.1222
LOG(X4)	0.071572	0.037223	1.922791	0.0562
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.895130	F-statistic	38.29490	
Adjusted R-squared	0.871755	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Hasil pengolahan Eviews 10

Berdasarkan estimasi model fixed effect diatas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LOG}(Y) = 5.039824C + 0.013592X1 + 0.260393\text{LOG}(X2) - 0.080595\text{LOG}(X3) + 0.071572\text{LOG}(X4) + \varepsilon_{it}$$

4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel X1, X2, X3, dan X4 mempengaruhi variabel Y. Hasil estimasi *Fixed Effect Model* dalam nilai *Adjusted R-squared* diperoleh sebesar 0.871755. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 dapat menjelaskan sekitar 87% variasi dalam variabel dependen Y, sedangkan sisa variasi dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.

4.4.2. Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh bersama-sama variabel X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel Y. Hasil uji regresi dengan model *fixed effect*, diperoleh nilai probabilitas (F-statistic) sebesar 0.000000 yang lebih kecil dari nilai alpha (α) = 10%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara signifikan variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y.

4.4.3. Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh individu variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi model *fixed effect*, diperoleh:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas variabel X1 sebesar $0.0001 < 10\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi, secara individu variabel X1 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Artinya, ketika variabel X1 naik 1%, maka variabel Y akan naik sebesar 0.013592%.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah

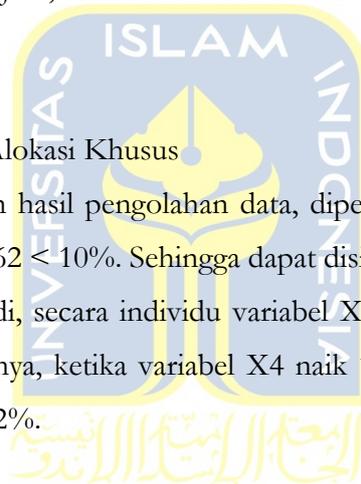
Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas variabel X2 sebesar $0.0347 < 10\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, secara individu variabel X2 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Artinya, ketika variabel X2 naik 1%, maka variabel Y akan naik sebesar 0.260393%.

3. Variabel Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas variabel X3 sebesar $0.1222 < 10\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi, secara individu variabel X3 tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai probabilitas variabel X4 sebesar $0.0562 < 10\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, secara individu variabel X4 berpengaruh positif terhadap variabel Y. Artinya, ketika variabel X4 naik 1%, maka variabel Y akan naik sebesar 0.071572%.



4.5. Interpretasi dan Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini selaras dengan penelitian (Kakasih dkk., 2018), yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian ini Pertumbuhan Ekonomi yang semakin besar akan memberikan kontribusi yang besar pula pada Belanja Modal. Seperti yang diketahui bahwa Belanja Modal ditujukan untuk peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah, maka besarnya Pertumbuhan Ekonomi dalam suatu daerah akan memberikan pengaruhnya pada Belanja Modal.

4.5.2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardhani, 2011), yaitu PAD berdampak besar pada berapa banyak pengeluaran bisnis untuk belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian ini PAD adalah pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, pajak daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan utama daerah wajib lainnya. Semakin tinggi nilai PAD, semakin besar sumber uang yang dihasilkan oleh PAD, maka semakin besar untuk meningkatkan Belanja Modal. Investasi dibagi menjadi biaya peralatan dan layanan publik seperti biaya personil, biaya komoditas, pembelian jalan, jalan raya, jembatan, gedung, jaringan listrik dan air minum, dll. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan PAD, semakin banyak pula dana yang harus disalurkan melalui Belanja Modal.

4.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil ini selaras dengan penelitian (Pramudya & Abdullah, 2021), yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal dan diperkuat oleh penelitian (Gerungan dkk., 2017), yang juga menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Penelitian dari Farhan Kresna Pramudya dan M. Faisal Abdullah (2021) menjelaskan bahwa provinsi yang menerima DAU dengan jumlah yang tinggi cenderung memiliki Belanja Modal yang rendah. Hal ini dikarenakan DAU digunakan untuk membiayai pengeluaran lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta pengeluaran belanja lainnya. Meskipun DAU merupakan sumber dana transfer terbesar dari pemerintah pusat, dalam konteks ini DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai jenis belanja selain Belanja Modal. Dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk DAU dialokasikan terutama untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta biaya lainnya. Selain itu,

anggaran investasi tidak sepenuhnya mengandalkan dana transfer DAU, tetapi dapat bersumber dari pendapatan asli daerah dan sumber anggaran lainnya. Perlu dicatat bahwa tidak semua provinsi di Indonesia menerima DAU dari pemerintah pusat. Tujuan awal DAU adalah untuk meratakan tingkat ekonomi antar daerah dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah. Jika suatu daerah memiliki potensi pajak yang tinggi, maka dana transfer DAU yang diterima akan lebih rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia tidak bergantung pada DAU dari pemerintah pusat untuk membiayai Belanja Modal.

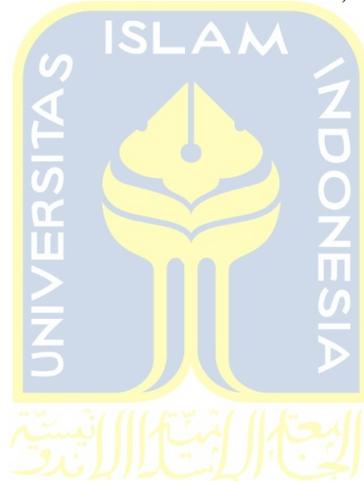
Penelitian ini sejalan dengan temuan Kusnandar (2012) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh parsial terhadap alokasi belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun DAU merupakan sumber pendapatan terbesar dalam proporsi penerimaan daerah, namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin seperti gaji pegawai (Ferdiansyah dkk., 2018).

Hasil tidak signifikan dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk ketimpangan anggaran DAU yang dialokasikan ke belanja modal antar daerah dan kurang tepatnya penggunaan anggaran DAU untuk belanja modal antar daerah, dapat mempengaruhi penggunaan DAU untuk belanja modal. Kurangnya transparansi dan masalah pengawasan dalam pengelolaan keuangan dapat menghambat penggunaan dana secara efektif untuk belanja modal. Sehingga membuat keterbatasan anggaran pemerintah atau defisit anggaran dapat membatasi kemampuan untuk meningkatkan belanja modal. Kondisi ini dapat mengakibatkan pengurangan atau penundaan belanja modal, meskipun dana alokasi umum ada.

4.5.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil ini selaras dengan penelitian (Sintha Rachmawati, 2014), yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian ini pengaruh penyambungan DAK terhadap Belanja Modal dapat dijelaskan dengan fakta bahwa DAK merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu dengan tujuan membantu pembiayaan kegiatan khusus sesuai dengan prioritas daerah dan nasional. Penggunaan DAK diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik jangka panjang, termasuk pembelian objek fisik untuk subsidi. Dengan penyertaan DAK diharapkan dapat mempengaruhi distribusi anggaran investasi, karena tujuan DAK adalah untuk menambah aset tetap yang dimiliki negara untuk meningkatkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut semakin besar DAK, semakin besar aktivitas belanja modal yang dilakukan oleh Pemerintah daerah.



BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia pada periode 2016-2021. Melalui analisis regresi data panel, penelitian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen tersebut berkontribusi terhadap Belanja Modal di Indonesia. Berdasarkan analisis kuantitatif yang telah dilakukan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia tahun 2016-2021.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia tahun 2016-2021.
3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia tahun 2016-2021.
4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia tahun 2016-2021.
5. Variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal di Indonesia tahun 2016-2021.

5.2. Implikasi

Beberapa implikasi yang didapat dari penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan belanja modal diperlukan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah disarankan untuk memperlancar aktivitas ekonomi seperti mobilisasi industri dan investasi sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan

berdampak pada peningkatan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kuat dapat memberikan dorongan bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja modal guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya. Pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk belanja modal guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing negara.

2. Peningkatan Pendapatan asli daerah dapat meningkatkan belanja modal. Peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk belanja modal, terutama dalam memperbaiki infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha daerah, guna mendukung belanja modal yang lebih besar. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kebijakan dan regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan memperkuat kapasitas mereka dalam merencanakan dan melaksanakan belanja modal. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan mengarahkannya ke belanja modal yang strategis.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat memberikan sumber dana tambahan yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam mendukung belanja modal. DAK dapat digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan lainnya yang tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh pendapatan asli daerah. DAK memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas investasi dalam sektor-sektor strategis, seperti transportasi, energi, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah pusat perlu terus melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan terkait DAK untuk meningkatkan kualitas belanja modal di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari dan Harianto, David. (2007). Hubungan Antara DAU, Belanja Modal, PAD dan Pendapatan Per Kapita, Simposium Nasional Akuntansi, Makassar.
- April, P., Akuntansi, J. R., Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, 6(3), 467–480. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Aprilianda, G. M. A. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. *Forum Bisnis Dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP Hal -39*, 2(1), 39–51.
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Modal (*Studi Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah*).
- Berlianantiya, M. (2017). Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembelajarannya*, 5(2), 163. <https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i2.1544>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dana, P., Umum, A., Dan, D. A. U., Alokasi, D., Dak, K., Belanja, T., Di, D., & Sulawesi, P. (2016). *Influence Of The General Allocation Fund (GAF) And Special Allocation Fund (SAF) Oleh: Claudia Salindebo¹ ¹²³Jurusan*

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado
Email: PENDAHULUAN Latar Belakang Pengertian otonomi daerah m.
4(3), 705–716.

- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. (2007). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No 01. Febuari 2007. BPPE UGM. Yogyakarta.
- Donarich Natanael, C. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Anggrena* 2012, 1–23.
- Febrian Sirait, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* 2022, 1- 13.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Inovasi*, 14 (1) 2018, 44-52.
- Gerungan, H. P., Paul, D., Saerang, E., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (*Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara*). 1, 233–245.
- Ginting, A. M. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Provinsi Di Pulau Jawa. *Jurnal Kajian*, 17(3), 357–382.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi. Umum,

- Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per. Kapita.
- Imron, A., & Hamidah. (2022). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1–6.
- Jolianis, J. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi*, 7(1).
<https://doi.org/10.22202/jp.v7i1.191>
- Kakasih, R. A., Kawung, G. M. V., & Tumangkeng, S. Y. . (2018). Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02), 124–134.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Kusnandar. (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sab terhadap Belanja Daerah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Malang
- Lontoh, Tari Natalia Nataisya (Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115 Indonesia).
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Monalisa, A. W. dan. (2019). *Pengaruh Belanja Modal Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. 3(2), 212–225.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pengalokasian Dana Alokasi Umum dalam Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 5(2), 129–144.
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/418/246>

- Ningsasra, Yanggi. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi* 4, no. 1 (2016).
- Nuarisa, Sheila Ardhian. Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Accounting Analysis Journal* 2, no. 1 (2013).
- Pada, S., Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa, P., Indonesia, E., & Astriani, E. F. (2009). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Wisuda Periode Maret 2014*.
- Pangestu p, P., Riany, M., Paramita J.S, E., & Sundaning K, E. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 26–32. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8445>.
- Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pradita, R. R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–28.
- Prakosa, Kesit Bambang. "Analisis pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap prediksi belanja daerah (studi empirik di wilayah propinsi Jawa Tengah dan DIY)." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* 8.2 (2004).
- Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. *Inovasi*, 17(4), 653–660. <https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041>.
- Putro, Suratno Nugroho. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal(studi kasus pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah).Jakarta : Universitas Esa unggul Jakarta.
- Rachmawati, Ayu Sintha. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

- (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011-2012). PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- RI, B. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Rizki Ardiyani, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di EKS-Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015. Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (*Cucurbita Moschata*) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.
- Rumefi, U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 122–130.
- Salindeho, C. (2016). Terhadap Belanja Daerah DI Provinsi Sulawesi Utara Influence Of The General Allocation Fund (GAF) And Special Allocation Fund (SAF) Against The Regional Expenditure In North Sulawesi Province Oleh : Claudia Salindeho^{1 123}Jurusan Akuntansi Fakultas Eko. *Jurnal EMBA*, 4(3), 705–716.
- Sintha Rachmawati, A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Sugiardi, N., & Supadmi, N. (2014). Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 7(2), 477–495.

- Sukmawati, N., Naryono, E., & Sukabumi, P. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 23–43.
- Suryani Putri, K. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. 1–23.
- Syah, M. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004*. 1–61.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1967). Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1–177.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1–68.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. In *Buku scan*.

LAMPIRAN

Lampiran I. Data Penelitian

Provinsi	Tahun	BM	PE	PAD	DAU	DAK
Nanggroe Aceh Darussalam	2016	2,284.85	3.29	2,060.18	1,263.00	151.68
Nanggroe Aceh Darussalam	2017	2,168.30	4.18	2,276.31	2,060.26	258.09
Nanggroe Aceh Darussalam	2018	2,503.94	4.61	2,359.39	2,060.26	265.37
Nanggroe Aceh Darussalam	2019	3,162.09	4.14	2,698.91	2,322.27	314.97
Nanggroe Aceh Darussalam	2020	1,755.47	-0.37	2,570.78	1,956.49	252.93
Nanggroe Aceh Darussalam	2021	2,199.33	2.79	2,505.89	1,945.98	288.20
Sumatera Barat	2016	989.93	5.27	1,964.15	1,261.00	152.94
Sumatera Barat	2017	832.18	5.30	2,134.01	2,014.65	180.85
Sumatera Barat	2018	1,099.70	5.14	2,275.09	2,014.65	225.40
Sumatera Barat	2019	1,062.23	5.01	2,328.43	2,076.43	240.42
Sumatera Barat	2020	736.89	-1.62	2,255.07	1,891.32	267.96
Sumatera Barat	2021	666.35	3.29	2,551.90	1,887.03	235.07
Sumatera Utara	2016	1,019.86	5.18	4,954.83	1,604.00	152.49
Sumatera Utara	2017	1,919.45	5.12	5,287.47	2,629.22	276.80
Sumatera Utara	2018	1,564.90	5.18	5,638.96	2,629.22	315.56
Sumatera Utara	2019	1,249.60	5.22	5,761.27	2,754.58	341.92
Sumatera Utara	2020	1,497.94	-1.07	5,531.24	2,474.47	335.51
Sumatera Utara	2021	1,141.20	2.61	6,402.71	2,463.69	261.03
Sumatera Selatan	2016	607.74	5.04	2,546.18	1,071.00	158.17
Sumatera Selatan	2017	1,377.38	5.51	3,031.63	1,697.90	141.48
Sumatera Selatan	2018	1,537.28	6.01	3,528.01	1,697.90	345.42
Sumatera Selatan	2019	1,606.22	5.69	3,494.51	1,775.42	231.44
Sumatera Selatan	2020	1,664.70	-0.11	3,375.10	1,568.60	203.72
Sumatera Selatan	2021	1,836.83	3.58	3,865.46	1,563.04	220.51
Lampung	2016	1,005.78	5.14	2,368.80	1,321.00	285.47
Lampung	2017	1,451.48	5.16	2,750.60	1,851.60	260.39
Lampung	2018	1,729.33	5.23	2,864.24	1,857.04	449.74
Lampung	2019	1,014.04	5.26	3,018.07	1,927.01	283.77
Lampung	2020	752.53	-1.67	2,842.29	1,732.55	263.39
Lampung	2021	849.69	2.77	3,249.67	1,726.30	310.50
Riau	2016	2,035.64	2.18	3,110.66	737.00	258.79
Riau	2017	1,941.22	2.66	3,360.01	1,458.00	127.61
Riau	2018	1,046.85	2.35	3,639.00	1,465.26	129.06
Riau	2019	1,161.04	2.81	3,558.21	1,548.58	249.43
Riau	2020	919.25	-1.13	3,333.18	1,432.35	254.33

Riau	2021	1,018.46	3.36	4,050.47	1,455.38	254.12
Kepulauan Riau	2016	303.20	4.98	1,079.31	866.00	153.92
Kepulauan Riau	2017	495.73	1.98	1,094.79	1,059.82	149.43
Kepulauan Riau	2018	620.06	4.47	1,220.77	1,150.52	154.82
Kepulauan Riau	2019	633.11	4.83	1,311.70	1,190.06	161.24
Kepulauan Riau	2020	586.61	-3.80	1,195.64	1,099.29	198.49
Kepulauan Riau	2021	338.33	3.43	1,375.77	1,092.93	174.48
Jambi	2016	945.54	4.37	1,233.51	1,070.00	152.18
Jambi	2017	895.65	4.60	1,580.30	1,397.91	162.29
Jambi	2018	784.72	4.69	1,656.57	1,399.37	163.73
Jambi	2019	866.50	4.35	1,651.09	1,440.42	173.72
Jambi	2020	642.70	-0.44	1,535.18	1,288.42	186.76
Jambi	2021	449.69	3.69	1,843.43	1,284.88	194.60
Kepulauan Bangka Belitung	2016	229.78	4.10	574.26	905.00	152.21
Kepulauan Bangka Belitung	2017	368.21	4.47	709.83	980.30	128.39
Kepulauan Bangka Belitung	2018	315.40	4.45	850.44	1,018.67	147.89
Kepulauan Bangka Belitung	2019	441.20	3.32	826.70	1,052.09	137.33
Kepulauan Bangka Belitung	2020	436.50	-2.30	683.43	942.31	169.74
Kepulauan Bangka Belitung	2021	428.65	5.05	895.76	939.55	140.75
Bengkulu	2016	385.97	5.28	731.56	1,070.00	153.52
Bengkulu	2017	711.07	4.98	804.58	1,301.54	149.61
Bengkulu	2018	618.48	4.97	872.26	1,301.54	110.70
Bengkulu	2019	741.82	4.94	826.67	1,334.18	148.68
Bengkulu	2020	417.10	-0.02	712.35	1,219.95	136.45
Bengkulu	2021	324.34	3.27	984.42	1,213.76	177.20
DKI Jakarta	2016	8,965.47	5.87	36,888.02	483.07	2.75
DKI Jakarta	2017	11,045.72	6.20	43,901.49	483.07	2.75
DKI Jakarta	2018	14,118.61	6.11	43,327.14	483.07	2.75
DKI Jakarta	2019	11,551.93	5.82	45,707.40	483.07	2.75
DKI Jakarta	2020	3,173.22	-2.39	37,414.75	483.07	26.67
DKI Jakarta	2021	6,865.83	3.56	41,606.31	483.07	46.94
Banten	2016	1,334.13	5.28	5,463.16	693.00	153.53
Banten	2017	1,349.69	5.75	5,756.37	1,059.32	68.91
Banten	2018	1,362.55	5.77	6,329.14	1,072.90	91.17
Banten	2019	1,379.32	5.26	7,022.31	1,219.39	142.32
Banten	2020	994.26	-3.39	5,906.54	1,042.97	95.93
Banten	2021	1,297.23	4.49	7,010.37	1,070.45	117.71
Jawa Barat	2016	2,859.36	5.66	17,042.90	1,247.00	152.48
Jawa Barat	2017	2,311.62	5.33	18,081.12	3,011.00	374.28
Jawa Barat	2018	3,145.85	5.65	19,642.92	3,023.55	506.12
Jawa Barat	2019	2,530.35	5.02	21,244.27	3,212.65	602.43

Jawa Barat	2020	1,672.91	-2.52	18,521.88	2,964.61	814.90
Jawa Barat	2021	2,045.43	3.74	20,333.68	3,007.93	481.66
Jawa Tengah	2016	2,815.68	5.25	11,541.03	1,859.00	151.53
Jawa Tengah	2017	1,454.60	5.26	12,547.51	3,652.59	348.12
Jawa Tengah	2018	1,681.75	5.30	13,711.84	3,652.59	266.99
Jawa Tengah	2019	2,099.72	5.36	14,437.91	3,866.39	267.10
Jawa Tengah	2020	996.99	-2.65	13,668.28	3,438.71	350.56
Jawa Tengah	2021	1,447.62	3.33	14,695.47	3,432.98	401.89
Jawa Timur	2016	2,150.59	5.57	15,817.80	1,672.00	150.78
Jawa Timur	2017	3,090.06	5.46	17,324.18	3,803.43	549.32
Jawa Timur	2018	2,840.55	5.47	18,531.06	3,813.41	306.84
Jawa Timur	2019	2,770.97	5.53	19,327.13	3,998.43	515.76
Jawa Timur	2020	1,904.56	-2.33	17,951.00	3,662.91	573.54
Jawa Timur	2021	1,969.92	3.56	18,935.89	3,650.37	585.99
Daerah Istimewa Yogyakarta	2016	1,836.87	5.05	1,673.75	940.00	153.43
Daerah Istimewa Yogyakarta	2017	1,046.73	5.26	1,851.97	1,314.37	115.34
Daerah Istimewa Yogyakarta	2018	1,132.83	6.20	2,040.72	1,314.37	59.47
Daerah Istimewa Yogyakarta	2019	1,035.20	6.59	2,082.80	1,351.10	109.13
Daerah Istimewa Yogyakarta	2020	940.63	-2.68	1,876.71	1,227.65	121.05
Daerah Istimewa Yogyakarta	2021	654.84	5.58	1,900.92	1,224.85	135.90
Bali	2016	730.92	6.33	3,041.20	850.00	178.95
Bali	2017	660.43	5.56	3,398.47	1,260.84	103.16
Bali	2018	440.71	6.31	3,718.50	1,268.59	52.15
Bali	2019	556.75	5.60	4,023.16	1,325.85	55.86
Bali	2020	458.45	-9.33	3,069.47	1,204.70	63.57
Bali	2021	839.01	-2.46	3,117.07	1,201.51	102.14
Nusa Tenggara Barat	2016	696.68	5.81	1,359.84	1,117.00	255.12
Nusa Tenggara Barat	2017	1,153.48	0.09	1,684.47	1,537.78	329.01
Nusa Tenggara Barat	2018	891.89	-4.50	1,660.42	1,537.78	330.07
Nusa Tenggara Barat	2019	669.71	3.90	1,807.48	1,594.56	434.25
Nusa Tenggara Barat	2020	608.30	-0.62	1,815.69	1,475.54	355.20
Nusa Tenggara Barat	2021	771.28	2.30	1,888.46	1,475.68	346.45
Nusa Tenggara Timur	2016	602.30	5.12	995.19	1,337.00	157.99
Nusa Tenggara Timur	2017	482.92	5.11	1,047.49	1,784.46	258.42
Nusa Tenggara Timur	2018	529.76	5.11	1,095.27	1,827.41	245.41
Nusa Tenggara Timur	2019	798.22	5.25	1,258.96	1,879.07	360.56
Nusa Tenggara Timur	2020	1,026.79	-0.84	1,166.57	1,716.21	537.00
Nusa Tenggara Timur	2021	903.26	2.52	1,238.03	1,726.71	389.87
Kalimantan Barat	2016	474.80	5.20	1,664.34	1,493.00	189.18
Kalimantan Barat	2017	954.92	5.17	1,945.65	1,720.70	423.09
Kalimantan Barat	2018	676.49	5.07	2,194.87	1,724.40	391.76

Kalimantan Barat	2019	871.61	5.09	2,301.31	1,756.07	319.74
Kalimantan Barat	2020	759.26	-1.82	2,154.15	1,563.77	312.10
Kalimantan Barat	2021	927.11	4.80	2,507.32	1,572.25	347.51
Kalimantan Selatan	2016	1,348.73	4.40	2,499.86	779.00	374.63
Kalimantan Selatan	2017	1,388.01	5.28	2,841.89	1,106.53	215.53
Kalimantan Selatan	2018	1,117.20	5.08	3,557.32	1,118.21	176.64
Kalimantan Selatan	2019	1,495.68	4.09	3,498.84	1,190.13	218.59
Kalimantan Selatan	2020	778.10	-1.82	2,940.40	1,091.04	125.32
Kalimantan Selatan	2021	956.16	3.48	3,564.91	1,093.34	227.86
Kalimantan Tengah	2016	783.86	6.35	1,158.30	1,294.00	272.45
Kalimantan Tengah	2017	565.25	6.73	1,342.33	1,574.38	171.37
Kalimantan Tengah	2018	1,060.39	5.61	1,616.52	1,574.38	268.46
Kalimantan Tengah	2019	1,293.57	6.12	1,776.23	1,610.55	204.06
Kalimantan Tengah	2020	1,108.30	-1.41	1,570.14	1,439.31	319.13
Kalimantan Tengah	2021	1,872.47	3.59	1,851.58	1,431.36	290.80
Kalimantan Timur	2016	1,571.81	-0.38	4,029.36	80.00	348.33
Kalimantan Timur	2017	938.34	3.13	4,588.75	714.91	265.94
Kalimantan Timur	2018	1,829.26	2.64	5,800.27	767.68	233.88
Kalimantan Timur	2019	1,207.82	4.70	6,555.85	816.73	221.09
Kalimantan Timur	2020	1,066.61	-2.87	5,289.23	831.40	212.15
Kalimantan Timur	2021	1,514.47	2.55	6,111.92	828.91	247.45
Kalimantan Utara	2016	797.28	3.55	507.96	1,065.00	179.13
Kalimantan Utara	2017	655.21	6.80	482.74	1,185.11	181.40
Kalimantan Utara	2018	637.66	5.36	574.09	1,185.11	184.66
Kalimantan Utara	2019	567.37	6.89	655.85	1,209.59	152.02
Kalimantan Utara	2020	665.17	-1.09	557.65	1,082.39	168.94
Kalimantan Utara	2021	390.90	3.98	677.80	1,079.27	134.60
Sulawesi Barat	2016	498.74	6.01	277.69	925.00	152.29
Sulawesi Barat	2017	459.84	6.39	296.94	1,008.36	158.32
Sulawesi Barat	2018	321.97	6.26	301.50	1,025.03	110.70
Sulawesi Barat	2019	364.25	5.56	345.21	1,064.07	179.52
Sulawesi Barat	2020	347.28	-2.40	346.86	968.83	245.32
Sulawesi Barat	2021	402.87	2.57	408.00	970.92	209.03
Sulawesi Tenggara	2016	751.92	6.51	753.66	1,200.00	190.99
Sulawesi Tenggara	2017	903.12	6.76	806.25	1,563.33	248.78
Sulawesi Tenggara	2018	795.20	6.40	903.95	1,575.96	377.43
Sulawesi Tenggara	2019	1,194.74	6.50	1,128.44	1,618.01	318.38
Sulawesi Tenggara	2020	1,048.33	-0.65	1,017.14	1,454.63	271.63
Sulawesi Tenggara	2021	1,246.77	4.10	1,373.79	1,456.62	314.87
Sulawesi Selatan	2016	856.86	7.42	3,449.56	1,394.00	425.47
Sulawesi Selatan	2017	1,051.19	7.21	3,679.08	2,509.48	370.19

Sulawesi Selatan	2018	1,081.81	7.04	3,948.35	2,509.48	342.48
Sulawesi Selatan	2019	969.49	6.91	4,138.63	2,586.31	295.97
Sulawesi Selatan	2020	1,195.02	-0.71	3,890.21	2,349.99	307.70
Sulawesi Selatan	2021	1,459.72	4.64	4,469.11	2,339.14	328.79
Sulawesi Tengah	2016	503.97	9.94	939.09	1,272.00	288.16
Sulawesi Tengah	2017	465.12	7.10	958.21	1,546.25	229.06
Sulawesi Tengah	2018	459.78	20.60	1,016.63	1,586.16	202.31
Sulawesi Tengah	2019	836.62	8.83	1,090.85	1,649.12	355.02
Sulawesi Tengah	2020	665.44	4.86	1,122.67	1,488.85	371.77
Sulawesi Tengah	2021	500.90	11.70	1,494.25	1,493.14	370.86
Sulawesi Utara	2016	745.90	6.16	981.04	1,065.00	169.47
Sulawesi Utara	2017	757.83	6.31	1,146.67	1,390.27	330.87
Sulawesi Utara	2018	721.40	6.00	1,253.80	1,427.54	283.48
Sulawesi Utara	2019	898.37	5.65	1,286.07	1,475.48	314.81
Sulawesi Utara	2020	1,090.98	-0.99	1,125.32	1,335.81	303.28
Sulawesi Utara	2021	1,031.25	4.16	1,310.53	1,330.46	256.48
Gorontalo	2016	296.92	6.52	311.22	884.00	152.14
Gorontalo	2017	254.84	6.73	348.27	997.60	94.34
Gorontalo	2018	280.50	6.49	384.44	1,006.92	69.73
Gorontalo	2019	280.12	6.40	433.43	1,060.34	103.04
Gorontalo	2020	199.80	-0.02	414.86	944.27	89.50
Gorontalo	2021	176.34	2.41	510.80	940.64	119.93
Maluku	2016	753.76	5.73	466.21	1,260.00	247.26
Maluku	2017	545.78	5.82	430.87	1,555.60	200.99
Maluku	2018	601.51	5.91	465.78	1,670.23	307.65
Maluku	2019	543.82	5.41	482.81	1,701.46	225.02
Maluku	2020	591.45	-0.92	545.75	1,524.47	253.15
Maluku	2021	591.45	3.05	545.75	1,524.36	367.54
Maluku Utara	2016	592.69	5.77	280.15	1,132.00	271.82
Maluku Utara	2017	561.61	7.67	327.47	1,265.85	221.03
Maluku Utara	2018	513.35	7.86	358.33	1,331.24	307.50
Maluku Utara	2019	671.27	6.25	433.45	1,357.60	373.39
Maluku Utara	2020	571.75	5.35	447.29	1,221.01	293.89
Maluku Utara	2021	821.98	16.79	552.35	1,222.53	343.41
Papua	2016	2,490.33	9.14	1,019.73	2,502.00	500.55
Papua	2017	2,328.01	4.64	1,020.37	2,338.20	295.04
Papua	2018	1,918.51	7.32	1,050.37	2,571.30	199.96
Papua	2019	2,236.55	-15.74	2,027.64	2,616.55	350.57
Papua	2020	839.21	2.39	1,388.51	2,330.02	252.90
Papua	2021	1,116.37	15.16	2,139.69	2,314.92	346.13
Papua Barat	2016	1,446.54	4.52	338.81	1,322.00	320.63

Papua Barat	2017	770.10	4.02	470.07	1,411.97	58.63
Papua Barat	2018	1,539.27	6.25	459.24	1,431.33	166.77
Papua Barat	2019	1,757.98	2.66	483.73	1,463.62	190.27
Papua Barat	2020	1,543.17	-0.76	485.37	1,299.87	168.87
Papua Barat	2021	2,435.06	-0.51	483.95	1,307.71	207.61

Lampiran II. Analisis Deskriptif

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	1314.976	3.979265	4536.657	1565.683	239.8389
Standard Error	115.267	0.260358	553.457	50.32549	8.554029
Median	923.18	5.03	1864.34	1398.64	228.46
Mode	591.45	5.26	545.75	483.07	2.75
Std. Devi	1646.342	3.71866	7904.947	718.7917	122.176
Sample Variance	2710442	13.82843	62488194	516661.5	14926.97
Kurtosis	32.39629	6.268638	12.86558	2.153792	2.262356
Skewness	5.262236	-0.65502	3.451716	1.430385	0.962765
Range	13942.27	36.34	45429.71	3918.43	812.15
Minimum	176.34	-15.74	277.69	80	2.75
Maximum	14118.61	20.6	45707.4	3998.43	814.9
Sum	268255	811.77	925478.1	319399.4	48927.13
Count	204	204	204	204	204

Lampiran III. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.976721	(33,166)	0.0000
Cross-section Chi-square	248.501829	33	0.0000

Lampiran IV. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.161954	4	0.0000

Lampiran V. Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 04/14/23 Time: 13:11
Sample: 2016 2021
Periods included: 6
Cross-sections included: 34
Total panel (balanced) observations: 204
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.039824	0.885946	5.688636	0.0000
X1	0.013592	0.003420	3.974556	0.0001
LOG(X2)	-0.260393	0.122267	2.129713	0.0347
LOG(X3)	-0.080595	0.051877	-1.553585	0.1222
LOG(X4)	0.071572	0.037223	1.922791	0.0562

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.895130	Mean dependent var	8.284682
Adjusted R-squared	0.871755	S.D. dependent var	3.341341
S.E. of regression	0.276298	Sum squared resid	12.67250
F-statistic	38.29490	Durbin-Watson stat	1.676501
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.867896	Mean dependent var	6.872854
Sum squared resid	13.24140	Durbin-Watson stat	1.575893